

PENOLAKAN IRAN TERHADAP TAWARAN KOALISI AMERIKA SERIKAT DALAM MEMERANGI PERGERAKAN ISIS

Teja Dewatama¹
Nim. 1002045088

Abstract

The emergence of ISIS movement in the Middle East raises an indication of the movement of terrorism and radical movement in Iraq and Syria in particular. This has led to strong reaction and international response related to the movement of terrorism. The United States calls on countries with a similar focus on counterterrorism to support the proposed coalition formed by the United States to combat ISIS movements. The main purpose of the coalition is to coordinate the threat mitigation shown by ISIS. This is done considering the strength of ISIS both in Iraq and in Syria is very large and has a high militancy rate. The International Coalition built by the United States received a positive response from the international community. The United States also claims that there are more than 50 countries willing to join the coalition and commit to stop the radical ISIS movement consisting of Western military forces and alliances with Middle Eastern countries. The United States also made a coalition offer to Iran at a bilateral meeting in discussing Iran's nuclear program negotiations and on the ISIS group's related threats. But in the meeting Iran rejected the offer of the US international coalition because Iran argued inefficient if it had to fight ISIS by way of war and Iran considers America's statement about forming a coalition against ISIS is only selfish.

Keywords :*The movement of ISIS, the United States International Coalition, Iran's Stance*

Pendahuluan

*Islamic State of Iraq and Syria/ Islamic State of Iraq and Levant (ISIS/ ISIL), yang bisa diterjemahkan dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), merupakan sebuah fenomena baru dalam dinamika lingkungan strategis global dan regional, khususnya di Timur Tengah. ISIS, yang resmi berdiri pada 2013 dan pada 2014 berubah namanya menjadi Islamic State atau Negara Islam (IS), merupakan sebuah kekuatan aktor non-negara (*non-state actor*) yang kemudian berkembang menjadi kekuatan yang menyaingi dan bahkan mampu mengalahkan negara serta menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan oleh negara-negara adidaya dan masyarakat internasional. ISIS sampai saat ini dikenal sebagai kelompok *jihadi* dan*

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: tejadewa.tama19@gmail.com

takfiri yang memiliki landasan ideologis fundamentalis Islam radikal dan transnasional yang dikembangkan dari paham teologi Sunni, khususnya aliran Wahabisme. ISIS merupakan produk dari dinamika politik regional di Timur Tengah pasca jatuhnya Presiden Saddam Hussein di Irak dan munculnya gerakan prodemokrasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikenal dengan nama Musim Semi Arab (*the Arab Spring*), khususnya di Suriah. Dari sisi ideologi politik, ISIS bercita-cita mendirikan sebuah negara kekhalifahan Islam (*Islamic Caliphate*), yang di dalamnya Syariah Islam diterapkan secara radikal dan eksklusif. Eksklusifisme ISIS bahkan lebih dari *Al-Qaeda*, yang notabene merupakan induknya. Sebab dalam pandangan ideologi ISIS, kelompok-kelompok berfaham Islam seperti Syiah dan bahkan sesama Sunni tetapi berada di luar ideologinya, dikategorikan sebagai kafir dan dianggap sebagai musuh.

ISIS merupakan sebuah kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara, deklarasi ini disampaikan oleh Abu Bakar Al-Baghdady pada tanggal 9 April 2013. Proklamasi kemerdekaan ini masih bersifat sepihak, sebab pemerintahan Suriah dan pemerintahan Irak tidak menyetujui peresmian ISIS sebagai sebuah negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga tidak memberikan pengakuan bahwa ISIS sebagai negara yang berdaulat. meski secara *de jure* belum diakui negara-negara lain, faktanya ISIS telah menguasai wilayah seluas 400.000 km² yang meliputi wilayah di Irak dan Suriah.

ISIS mendirikan lembaga khusus yang membawahi berbagai aktivitas negara terkait pelayanan publik. Lembaga ini disebut *Al-Idaaroh Al-Islamiyyah lil Khidmati al 'Aammah* atau Administrasi Islami untuk Pelayanan Publik, yang dipimpin Abu Jihad asy Syami selaku direktur. Kantor *Al-Idaaroh Al-Islamiyyah* menyediakan semua kebutuhan mendasar bagi warganya (sandang dan pangan), maupun kebutuhan umum lainnya seperti air, listrik, fasilitas umum, jalur komunikasi, sampai transportasi umum. Tarif dasar listrik dan tarif internet pun sangat murah. Kini, cabang-cabang *Al-Idaroooh Al-Islamiyyah* sudah ada di hampir seluruh wilayah kekuasaan ISIS, termasuk di Suriah Utara yang menjadi basis terkuat ISIS selama ini.

Sejak kemunculannya pada 2013, ISIS telah melakukan berbagai aksi bersenjata melawan pemerintah di Irak dan Suriah dan telah menelan korban jiwa ribuan orang dan harta benda yang besar di wilayah kedua negara. ISIS telah mengeksekusi sekitar 3.027 orang di Suriah dalam setahun dan diantaranya sekitar 1.787 orang adalah warga sipil termasuk anak-anak. Tindakan-tindakan kekerasan ISIS yang dinilai sebagai aksi teror dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti eksekusi publik, pemenggalan kepala, genosida, pemerkosaan, dan berbagai aksi brutal lainnya telah mengundang kecaman dan kutukan luas di dunia, serta membangkitkan kemarahan masyarakat internasional terhadapnya. Selain kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, para pendukung ISIS juga tidak segan-segan melakukan penghancuran tempat-tempat suci yang dihormati pemeluk Islam maupun non-Muslim, menjarah dan membakar warisan kebudayaan dunia serta peradaban Islam yang berada di wilayah yang dikuasainya di Irak dan Suriah.

Kota-kota yang dikuasai ISIS di Irak relatif stabil, bahkan setelah ISIS mampu mengambil alih sejumlah kota penting di Irak, seperti Mosul di Tikrit. Saat serangan

terjadi, tentara Irak tidak mampu untuk mengamankan kota Mosul. Pada tahun 2013 ISIS menyerbu Kota Fallujah dan menguasai wilayah di tepi Aleppo di Suriah barat. Dalam strategi tempur, ISIS menggunakan taktik ekstrem yaitu melakukan penyerangan bersenjata, penyanderaan hingga pembantaian. Karena menguasai kota-kota di kedua sisi perbatasan Suriah-Irak, pasukan ISIS dengan cepat mampu memindahkan senjata yang disita dari Mosul ke Suriah. Senjata-senjata, termasuk humvee, senapan, rudal, dan amunisi, jelas menambah kemampuan tempur gerilyawan ISIS. Sebaliknya, kota-kota yang dikuasai ISIS di Suriah masih mengalami penyerangan.

ISIS mendapat perlawanan dari kelompok pejuang Suriah lainnya seperti Jabhat An Nusrah, Jabhah Islamiyah, Ahrar As-Syam, dan lain-lain. Untuk menghentikan konflik antar kelompok pejuang Suriah, para ulama yang dianggap netral kemudian menggelar inisiatif untuk membentuk Mahkamah Syariah. Tetapi inisiatif ini ditolak ISIS. Bahkan ISIS menganggap kaum yang kontra dengannya sebagai takfiri alias kafir. Sebaliknya, pejuang di Suriah menganggap ISIS sebagai kelompok khawarij. Kemunculan pergerakan ISIS di Timur Tengah menimbulkan adanya indikasi pergerakan terorisme dan *radical movement* di Irak dan Suriah pada khususnya. Hal ini yang menyebabkan reaksi keras dan tanggapan dunia internasional terkait pergerakan terorisme. Khusus bagi Amerika Serikat, sebagai negara yang memiliki hegemoni di kawasan Timur Tengah seperti Irak dan memiliki kepentingan politik di Suriah, merasa perlu melakukan upaya preventif dan refresif. Dimana upaya preventifnya adalah Amerika Serikat melakukan pembentukan koalisi internasional sedangkan upaya refresifnya adalah Amerika Serikat melakukan serangan militer terhadap gerakan ISIS. Amerika Serikat menghimbau negara-negara yang memiliki fokus yang sama terhadap pemberantasan terorisme untuk mendukung penawaran pembentukan koalisi yang dibentuk Amerika Serikat untuk memerangi pergerakan ISIS.

Tujuan utama koalisi tersebut adalah untuk mengkoordinasikan penanggulangan ancaman yang ditunjukkan ISIS. Dengan semakin banyaknya negara yang bergabung, maka semakin banyak sumberdaya baik manusia ataupun teknologi untuk melawan ISIS. Keseriusan Amerika Serikat dalam memerangi ISIS terbukti dengan membangun koalisi dengan berbagai negara baik dengan sekutu-sekutunya di Timur Tengah maupun diluar Timur Tengah. Hal ini dilakukan mengingat kekuatan ISIS baik di Irak maupun di Suriah sangat besar dan memiliki tingkat militansi yang tinggi. Koalisi Internasional yang dibangun oleh Amerika Serikat mendapat tanggapan positif dari dunia internasional. Dengan bergabungnya beberapa negara dalam koalisi tersebut diharapkan akan menghambat meluasnya gerakan ISIS. Anggota koalisi pun diharapkan dapat memberikan dukungan baik bantuan kemanusiaan ataupun bantuan kemiliteran. Adapun tawaran koalisi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap negara Arab yaitu sebuah koalisi lima negara Arab, antara lain Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Yordania, dan Uni Emirat Arab bergabung dalam melancarkan serangan udara. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama mengatakan, pemerintahnya dan sekutunya akan melumpuhkan ISIS dan pada akhirnya mengalahkan ISIS. Koalisi melawan ISIS terbentuk pada tanggal 4 September saat KTT Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Newport, Wales. Presiden Obama yakin dengan terbentuknya koalisi

internasional dapat memukul mundur militan, yang telah merebut sebagian besar wilayah di Suriah dan Irak.

Amerika Serikat mengklaim telah membangun koalisi yang terdiri dari 10 negara inti dan 30 negara yang mendukung dalam aspek militer untuk memerangi kelompok ISIS sedangkan negara lainnya akan membantu di bidang lain seperti bantuan kemanusiaan. Amerika Serikat juga mengklaim bahwa ada lebih dari 50 negara yang bersedia bergabung dalam koalisi dan berkomitmen menghentikan pergerakan radikal ISIS yang terdiri dari kekuatan militer negara Barat dan persekutuan dengan negara-negara Timur Tengah.

Amerika Serikat juga melakukan tawaran koalisi kepada Iran yang dilakukan pada pertemuan bilateral dalam membahas negosiasi program nuklir Iran dan tentang ancaman terkait kelompok ISIS pada tanggal 21 September 2014 di Hotel Waldorf Astoria, New York. Jika dilihat dari letak geografis, Iran berbatasan langsung dengan Irak dan Suriah dimana dalam kawasan tersebut ISIS melakukan gerakan dan invasi secara radikal. Dari kedekatan letak geografi tersebut keamanan dan keselamatan negara Iran menjadi terancam dengan adanya gerakan ISIS. ISIS mengklaim telah melakukan serangan teror di gedung parlemen Iran dan kompleks Mausoleum Ayatollah Khomeini pada 7 juni 2017 dan menewaskan 12 orang. Amerika yang memiliki fokus untuk meminimalisir dan bahkan menghentikan ancaman teroris terhadap dunia global telah melakukan berbagai upaya yaitu dengan membangun koalisi internasional. Dalam upaya tersebut Amerika mengajak negara-negara yang memiliki fokus yang sama untuk bersama menghentikan ancaman ISIS dan Amerika juga mengajak Iran untuk masuk ke dalam koalisi internasional tersebut, namun dalam tawaran tersebut Iran justru menolak. Hal ini menjadi dasar alasan bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang penolakan Iran terhadap tawaran koalisi Amerika Serikat dalam memerangi pergerakan ISIS. Terlepas dari kepentingan Amerika Serikat, Iran seharusnya menerima tawaran koalisi internasional tersebut karena ISIS telah mengancam keamanan negara Iran dan global.

Pada 10 September 2014, presiden Obama mengumumkan terbentuknya koalisi global guna “menghadapi dan mengalahkan” ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Sekitar 60 lebih negara dan organisasi internasional setuju untuk turut serta dalam koalisi ini guna memerangi ISIS. Lalu pada 3 Desember 2014 di Brussels 60 keanggotaan koalisi ini setuju untuk bergerak sesuai 5 garis besar tindakan/upaya (*Lines Of Effort*), yang dipimpin paling sedikit 2 negara pada setiap upayanya, yaitu:

1. Memberikan *support* pada operasi militer, pembangunan kapasitas, dan pelatihan, dipimpin oleh Iraq dan amerika serikat
2. Menghentikan arus masuk para penjuang teroris asing, dipimpin oleh Belanda dan Turki
3. Menghentikan pembiayaan dan pendanaan ISIS, dipimpin oleh Italia, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat
4. Menangani bantuan kemanusiaan dan permasalahan-permasalahan menyakutt krisis terkait, dipimpin oleh Jerman dan Uni Emirat Arab dan;
5. Mengungkap sifat sejati ISIS, yang dipimpin oleh Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat

Anggota koalisi disatukan karena adanya kepentingan bersama untuk menekan dan mengalahkan ISIS melalui pendekatan yang kuat, juga kerjasama dengan, untuk, dan melalui operasi militer; Mendukung stabilisasi wilayah yang telah dibebaskan dari ISIS dan, meningkatkan kerjasama internasional melawan tujuan global ISIS dengan berbagi informasi, kerja sama melalui penegakan hukum, memutuskan jalur pendanaan ISIS, melawan perekrutan ekstremis yang keras, dan menetralkan narasi ISIS. Koalisi global ini juga terlibat dalam upaya sipil yang mencakup luas untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang berpindah secara terpaksa dan terkena dampak konflik, dan juga mendukung upaya stabilisasi di wilayah yang dibebaskan dari ISIS. Upaya gabungan koalisi ini telah mengurangi kemampuan militer ISIS, keuntungan teritorial, kepemimpinan, sumber keuangan, dan pengaruh secara on-line.

Menurut data departemen dalam negeri Amerika Serikat, terdapat 68 *participant* dalam koalisi internasional terbesar di dunia ini, yaitu :

AFRIKA	Mesir, Libya, Moroko, Nigeria, Somalia, Tunisia
AMERIKA	Kanada, Panama, <i>United States</i>
ASIA PASIFIK	Afghanistan, Australia, Jepang, Malaysia, New Zealand ,Singapur, Korea Selatan, Taiwan
EROPA	Albania, Austria, Belgium, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, <i>Czech Republic</i> , Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Yunani, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, <i>United Kingdom</i>
TIMUR TENGAH	Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab
INSTITUSI	Liga Arab, Uni Eropa, INTERPOL

Sumber: Website Departemen Dalam Negeri AS

AS menekankan bahwa akan ada peran yang dapat dilakukan oleh setiap negara guna melemahkan dan mengalahkan ISIS. Walaupun terdapat beberapa anggota koalisi yang berkontribusi pada bidang militer, dengan menyediakan senjata, peralatan, pelatihan, atau rekomendasi yang mencakup negara-negara di Eropa dan wilayah Timur Tengah yang berkontribusi terhadap serangan udara melawan ISIS. Namun juga terdapat berbagai bentuk sumbangan internasional, yang berguna mengatasi krisis dan masalah-masalah humanitarian. Selain itu juga upaya untuk melemahkan dan pada akhirnya mengalahkan ISIS akan memerlukan penguatan pada beberapa lini upaya, termasuk pada pencegahan arus dana dan aliran masuknya pejuang ke pusat maupun penyebaran pada markas ISIS di berbagai belahan dunia, dan mengekspos sifat asli dari organisasi militer ISIS ini.

Tujuan awal koalisi ini pada tahun 2014 disebutkan adalah untuk menghancurkan induk ISIS di Iraq dan Syria, Memerangi penyebarannya di seluruh dunia, dan melindungi semua kedaulatan semua negara.

Setiap negara berkontribusi terhadap koalisi dengan cara yang sesuai dengan kepentingan nasional dan keunggulan komparatifnya masing-masing. Kontribusi tersebut mencakup bantuan militer dan non-militer, walaupun laporan tentang sumbangan yang bersifat non-militer cenderung bersifat sporadis, karena banyak negara menyumbangkan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah yang beroperasi di lapangan. Namun, beberapa contoh dari jenis bantuan bilateral yang diberikan saat koalisi telah terbentuk pada bulan September 2014 meliputi bantuan sumbangan sebesar US \$ 9 juta dari Swiss kepada Irak, kontribusi Belgia dengan memberikan bantuan dengan total seberat 13 ton ke Irak, sumbangan Italia sebesar \$ 2,5 juta untuk persenjataan (termasuk senapan mesin, granat berpeluncur roket, dan 1 juta peluru amunisi), dan pemberian Jepang sekitar \$ 6 juta untuk bantuan darurat untuk secara khusus membantu orang-orang terlantar di Utara Irak.

Sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh koalisi global ini mencakup, operasi militer, upaya sipil seperti bantuan kemanusiaan, stabilisasi daerah konflik, pemblokiran aliran dana, inisiatif multilateral untuk menyelesaikan masalah global, *Counter-Messaging*, *Counter-finance*, *Countering Foreign Terrorist Fighters* (FIF). Adapun upaya secara rinci ialah sebagai berikut :

Operasi Militer.

23 anggota koalisi memiliki lebih dari 9.000 tentara di Irak dan Suriah untuk mendukung upaya mengalahkan ISIS. Operasi militer koalisi telah membebaskan 62 persen medan yang pernah dikuasai ISIS di Irak dan 30 persen di Suriah, termasuk kota-kota utama di kedua negara. Jumlah pejuang ISIS di Irak dan Suriah berada pada tingkat terendah sejak kelompok tersebut mengumumkan "kekhalifahannya", turun lebih dari setengah sejak puncaknya pada tahun 2014.

Aset udara koalisi telah melakukan lebih dari 19.000 penyerangan terhadap target ISIS, menyingkirkan puluhan ribu pejuang ISIS dari medan perang dan membunuh lebih dari 180 pemimpin ISIS tingkat menengah ke atas, termasuk hampir semua deputy Abu Bakr al-Baghdadi, menteri yang disebut menteri Perang, informasi, keuangan, minyak dan gas, dan kepala operasi militer eksternalnya. Serangan udara presisi ini menargetkan komplotan penyerang eksternal ISIS, komandan militer, pejabat administratif, fasilitator, dan komunikator, serta aset energi, fasilitas komando dan kontrolnya, dan fasilitas penyimpanan kas massal.

Pasukan Keamanan Irak secara resmi membebaskan Mosul timur pada tanggal 24 Januari 2017 dan sekarang membuat keuntungan teritorial yang signifikan di bagian barat kota. Sampai saat ini, upaya koalisi telah melatih hampir 90.000 anggota Pasukan Keamanan Irak, termasuk tentara Angkatan Darat Irak, tentara Kontra Terorisme, Peshmerga Kurdi, polisi federal dan tentara keamanan perbatasan, dan sukarelawan suku.

Upaya Sipil Melalui Stabilisasi, Humanitarian, dan Bantuan Ekonomi

Sejak tahun 2014, anggota koalisi telah menyediakan lebih dari 22,2 miliar dolar amerika untuk stabilisasi, mematikan ranjau darat, dukungan ekonomi, dan bantuan kemanusiaan di Irak dan Suriah. Juli lalu, pada Konferensi Ikrar Irak yang diadakan di Washington, para anggota koalisi menjanjikan lebih dari 2,3 miliar dolar untuk bantuan kemanusiaan, stabilisasi, dan pembasmian ranjau di Irak. Koalisi

diperkirakan akan meningkatkan jumlah bantuan ini sekitar \$ 2 miliar pada tahun 2017.

United Nations Development Program (UNDP), yang bekerja di Irak dengan anggota koalisi lokal, telah menerapkan lebih dari 350 proyek sampai saat ini, yang semuanya telah mencapai tujuan yang mereka maksudkan tepat waktu dan biaya. Proyek pertama untuk Mosul sudah dimulai dijalankan di pinggiran kota, dan 43 juta dolar peralatan preposisi sedang digunakan. Pemberian jaminan sipil oleh polisi terlatih juga penting untuk upaya stabilisasi. Lima negara telah bergabung dengan usaha yang dipimpin oleh Italia untuk melatih lebih dari 7.000 polisi Irak sampai saat ini, dan telah meluluskan sekitar 900 petugas polisi baru setiap bulannya.

Pemerintah Pusat Irak telah membuktikan kemampuannya untuk menangani berbagai isu penting, termasuk mendukung pemerintahan daerah, menjaga keamanan, menyediakan listrik dan layanan penting lainnya, mengelola ekonomi, mempertahankan integritas teritorialnya, dan menegakkan hak semua orang Irak terlepas dari etnisitas mereka, jenis kelamin, agama, atau keyakinan. Kesuksesan Irak dalam merehabilitasi sebagian besar komunitas diklaim disebabkan oleh kemitraan anggota koalisi yang memungkinkan UNDP untuk menyediakan lebih dari 240 juta dollar amerika untuk program stabilisasi selama dua tahun terakhir. Secara total, lebih dari 1,5 juta orang Irak telah kembali ke rumah masing-masing. Proyek stabilisasi PBB, yang didanai oleh koalisi, telah membantu mengembalikan lebih dari 500.000 pengungsi ke Propinsi Anbar, termasuk ke kota-kota Ramadi dan Fallujah. Di Mosul timur dan sekitarnya, lebih dari 70.000 pengungsi telah kembali dengan sukarela ke rumah mereka, Dewan Provinsi Ninewa juga telah kembali, dan PBB telah memulai operasi stabilisasi.

Inisiatif Multilateral Untuk Menyelesaikan Permasalahan Global

Para anggota koalisi telah menyadari pentingnya jaringan informasi bersama untuk secara efektif melawan ancaman global ini dan mengkoordinasikan upaya untuk mencegah dan menurunkan aktivitas ISIS. Anggota koalisi telah mengambil langkah untuk memperkuat kapasitas mereka untuk berbagi informasi, selagi membangun dan memperkuat kemitraan dengan organisasi multi-nasional seperti INTERPOL dan EUROPOL, dan di antara badan-badan nasional seperti Financial Intelligence Units. Selain bantuan kemanusiaan dan stabilisasi, Amerika Serikat telah mengembangkan Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme. Koalisi juga mendesak penerapan penuh beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang mewajibkan negara-negara untuk melakukan tindakan tertentu terhadap ISIS, seperti mencegah transfer senjata atau penyediaan dana. Forum Kontra Terorisme Global (GCTF) telah mengembangkan serangkaian inisiatif, program pelatihan, dan praktik terbaik global untuk menangani siklus ekstremisme. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk membatasi kemampuan ISIS untuk beroperasi secara bebas melintasi perbatasan internasional.

Counter-Messaging

Membangun perlawanan terhadap propaganda ekstremis dan melawan penggunaan internet oleh teroris dinilai sangat penting bagi koalisi yang dipimpin AS ini. Negara-negara anggota Koalisi Global menciptakan sebuah respon tanggap nasional yang mengkoordinasikan upaya dalam mencegah komunikasi ISIS terhadap publik di tingkat regional dan global. Kelompok Kerja Komunikasi Koalisi Global Counter

ISIS (yang dipimpin oleh UAE, Inggris, dan AS) secara teratur mengadakan pertemuan dengan lebih dari 30 negara anggota dan perusahaan media dan teknologi untuk berbagi informasi dan strategi untuk melawan pesan ekstrim keras secara online dan menyajikan narasi alternatif yang lebih positif: pertemuan terakhir terjadi di London pada tanggal 28 Februari dihadiri oleh 38 negara. Selain itu, Twitter telah menanggukkan lebih dari 635.000 akun yang berhubungan dengan ISIS atau yang terafiliasi dan telah terbukti menyalahgunakan platform mereka sejak pertengahan tahun 2015.

Counter-Finance

Upaya militer ini untuk merusak atau menghancurkan lebih dari 2.600 target sumber energi ISIS. Serangan udara koalisi terhadap aset energi telah menghambat kemampuan ISIS untuk memproduksi, menggunakan, dan mendapatkan keuntungan dari minyak. Serangan udara koalisi juga menargetkan lebih dari 25 situs penyimpanan kas ISIS, menghancurkan puluhan juta - dan mungkin ratusan juta dolar. Selain itu, Koalisi telah bekerja sama dengan Pemerintah Irak dalam upayanya untuk mencegah ISIS menyalahgunakan sistem keuangan.

Pemerintah Irak telah memotong lebih dari 90 cabang bank di wilayah ISIS dari sistem keuangan dan bank sentral Irak telah membuat daftar lebih dari 100 rumah pertukaran dan perusahaan pemindah uang yang beroperasi di daerah yang dilalui ISIS atau memiliki hubungan dengan ISIS. Entitas dalam daftar ini sekarang dilarang mengakses uang kertas A.S. melalui lelang mata uang bank sentral, dan daftar tersebut telah dibagikan dengan regulator regional dan melalui saluran FIU. Pemerintah Irak, dengan dukungan koalisi, juga melarang penyaluran pembayaran gaji pemerintah di wilayah yang berada dalam teritori ISIS.

The Coalition's Counter Finance Group atau CIFG sedang menyelesaikan sebuah laporan mengenai pembiayaan cabang ISIS yang akan memberi para anggota Koalisi pemahaman dasar tentang hubungan keuangan antara markas pusat ISIS dan cabang globalnya, dan mekanisme pembiayaan ke cabang ISIS. CIFG juga memimpin upaya global untuk memastikan implementasi penuh dari beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang semua bentuk dukungan finansial terhadap ISIS, termasuk dana yang diperoleh dari penculikan untuk mendapatkan uang tebusan, perdagangan gelap atas benda warisan budaya yang dicuri, dan penjualan sumber daya alam.

Countering- Foreign Terrorist Fighters (FTF)

Banyaknya pejuang dari luar Irak dan Suriah yang hendak bergabung dengan ISIS turun secara signifikan tahun lalu setelah mencapai puncaknya pada tahun 2014. Penurunan ini dinilai signifikan, berkepanjangan, dan tersebar secara geografis. Sekarang, lebih dari 60 negara memiliki undang-undang untuk mengadili dan menghukum kegiatan FTF dan menciptakan hambatan untuk bepergian ke Irak dan Suriah. Sedikitnya 65 negara telah melakukan penuntutan atau penangkapan pejuang teroris asing atau fasilitator FTF. Sedikitnya 60 negara telah memberikan profil terduga pejuang FTF ke Interpol. Ada lebih banyak pencarian database Interpol pada November 2016 daripada di tahun 2015. Setidaknya 26 anggota koalisi berbagi informasi keuangan yang dapat memberikan tindakan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengadili atau menargetkan FTF. Setidaknya 31 negara menggunakan langkah-langkah untuk memilah para pejuang yang menyamar

sebagai wisatawan. Karena arus pejuang teroris asing (FTF) telah berkurang, tantangan tersebut telah berubah. Kini, negara-negara anggota harus mampu mencegah tindak terorisme para pejuang teroris asing (FTF) yang telah kembali ke rumah di negara asal mereka. Komponen utama untuk menangani pejuang teroris asing (FTF) adalah rehabilitasi dan reintegrasi. Negara-negara difokuskan untuk memperkuat kapasitas mereka untuk menilai, mengklasifikasi, rumah dan meninjau kembali pejuang teroris asing (FTF) di dalam sistem penjara mereka.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional. Sementara menurut KJ Holsti, Kebijakan luar negeri merupakan tindakan atau gagasan, yang dirancang oleh pembuat keputusan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan yaitu, dalam kebijakan, sikap, atau tindakan negara lain.

Menurut KJ Holsti, ada empat kondisi atau variabel yang dapat mempengaruhi strategi atau kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan:

1. Struktur sistem internasional. Pola dominasi, sub-ordinasi, dan kepemimpinan dalam sistem internasional menetapkan beberapa batasan pada kebebasan bertindak unit komponen.
2. Sifat sikap dan kebutuhan sosio-ekonomi domestiknya.
3. Derajat pemahaman para pembuat kebijakan terhadap ancaman luar yang berkesinambungan sehubungan dengan nilai dan kepentingan mereka sendiri akan sangat berkaitan dengan orientasi mereka terhadap lingkungan eksternal.
4. Letak geografis, karakteristik topografis, dan sumbangan suatu negara dalam sumber daya alam sering dapat dikaitkan dengan pilihan orientasinya.

Adapun menurut Rossenau pembuatan keputusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh variabel-variabel:

1. Individu (*individual*). Variabel individual adalah semua aspek dari seseorang pembuat keputusan (nilai, bakat dan pengalamannya) yang membedakan pilihan-pilihan kebijakan luar negerinya atau perilakunya dengan membuat keputusan lain.
2. Peran (*role*). Peran merupakan semua variabel yang berkaitan dengan perilaku eksternal seorang pejabat yang berasal dari peran yang dimainkan dan yang terlepas dari karakteristik individunya.
3. Pemerintah (*government*). Pemerintah berkaitan dengan aspek-aspek dari struktur pemerintah yang dapat membatasi atau mendukung pilihan kebijakan luar negeri yang dibuat pembuat keputusan.
4. Masyarakat (*social*). Masyarakat merupakan aspek-aspek bukan pemerintah (*non-governmental*) dari suatu masyarakat yang mempengaruhi perilaku eksternal, seperti orientasi nilai yang utama suatu masyarakat, tingkat kesatuan nasional, dan perkembangan industrialisasinya.
5. Sistemik (*systemic*). Sistemik terdiri dari semua aspek-aspek bukan manusia dari lingkungan eksternal suatu masyarakat atau setiap tindakan yang terjadi diluar

negaranya yang dapat mengkondisikan bahwa mempengaruhi pilihan-pilihan yang dibuat pemerintahnya. Sistemik adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan luar negeri suatu negara yang terdiri dari:

- 1) Faktor geografis
- 2) Interaksi internasional
- 3) Struktur sistem internasional.

Kerumitan yang muncul dari studi kebijakan luar negeri suatu negara dihasilkan oleh campuran elemen-elemen yang acak. Dengan kata lain, perilaku kebijakan luar negeri tidaklah dipengaruhi oleh *singel* faktor. Dalam kenyataannya, suatu fenomena atau *event* adalah hasil interaksi atau jalinan dari beragam faktor dan dalam jumlah yang besar, yang tidak hanya kepentingan nasional, tapi dipengaruhi oleh ideologi, letak geografis, latar belakang historis, struktur sistem internasional, kondisi politik domestik dan lainnya. Jadi bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh *multiple factor*.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksplanatif, yang akan memberikan gambaran secara mendalam mengenai bagaimana penolakan Iran terhadap tawaran koalisi Amerika Serikat dalam memerangi pergerakan ISIS.

Hasil Penelitian

Dalam membuat kebijakan luar negeri terdapat beberapa proses penting yang dapat memengaruhi hasil dari kebijakan itu sendiri. Maka dari itu, pembahasan mengenai pengambilan keputusan luar negeri menjadi penting sebagai bagian dari *foreign policy analysis*. Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh suatu negara dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

Dalam hal ini sikap Iran terhadap koalisi Amerika Serikat merupakan kebijakan luar negeri Iran atau tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan dalam menghadapi negara lain berdasarkan keputusan yang dipengaruhi oleh variabel-variabel pembuatan keputusan kebijakan luar negeri Iran khususnya berdasarkan keputusan krisis, dan penolakan Iran terhadap tawaran koalisi Amerika Serikat diambil karena berdasarkan oleh beberapa alasan.

Menurut KJ Holsti, ada empat kondisi atau variabel yang dapat mempengaruhi strategi atau kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan:

1. Struktur sistem internasional. Pola dominasi, sub-ordinasi, dan kepemimpinan dalam sistem internasional menetapkan beberapa batasan pada kebebasan bertindak unit komponen.
2. Sifat sikap dan kebutuhan sosio-ekonomi domestiknya.
3. Derajat pemahaman para pembuat kebijakan terhadap ancaman luar yang berkesinambungan sehubungan dengan nilai dan kepentingan mereka sendiri akan sangat berkaitan dengan orientasi mereka terhadap lingkungan eksternal.
4. Letak geografis, karakteristik topografis, dan sumbangan suatu negara dalam sumber daya alam sering dapat dikaitkan dengan pilihan orientasinya.

Dampak Serangan Amerika Terhadap Beberapa Tempat di Kawasan Timur Tengah

Dampak serangan Amerika terhadap kawasan Timur Tengah merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil pembuat kebijakan, dalam hal ini dampak serangan Amerika termasuk dalam salah satu variabel Kebijakan Luar Negeri yang disusun oleh KJ Holsti, yaitu letak geografis, karakteristik topografi, dan sumbangan suatu negara dalam sumber daya alam yang sering dapat dikaitkan dengan pilihan orientasinya.

Dalam situasi mengancam Iran mengambil keputusan kebijakan luar negeri berdasarkan alasan yang dipengaruhi oleh variable pembuatan keputusan luar negeri Iran yaitu berdasarkan keputusan krisis. Dalam hal ini dampak serangan militer Amerika Serikat terhadap beberapa tempat di kawasan Timur Tengah.

Seperti yang terjadi pada tanggal 7 April 2017 baru-baru ini memicu perdebatan internasional. Rusia sangat menentang serangan rudal-rudal jelajah Tomahawk Amerika Serikat (AS) terhadap pangkalan udara Suriah. Serangan AS pada 7 April di nilai dapat memicu Perang Dunia (PD) III, terlebih pasukan Rusia juga berada di lokasi yang diserang AS. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan situasi di Suriah dapat berujung pada konflik bersenjata internasional menyusul serangan AS.

Menurut juru bicara ICRC Iolanda Jaquemet di Jenewa, setiap operasi militer oleh negara lain di wilayah Suriah tanpa persetujuan dari PBB hanya akan menyulut konflik bersenjata internasional. Berdasarkan informasi yang tersedia, serangan AS pada infrastruktur militer Suriah, telah membuka konflik internasional.

Sedangkan Yaman mengutuk serangan Amerika Serikat, dan mengatakan bahwa serangan dilakukan berdasarkan sesuatu yang belum terbukti. Dewan Politik Yaman mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, bahwa bangsa Yaman mendukung tanggapan Suriah atas agresi AS.

Perdana Menteri (PM) Rusia Dmitry Medvedev melalui akun media sosialnya menyebut tindakan AS sebagai satu langkah menuju bentrok dengan militer Rusia. Moskow telah merespons serangan AS ini dengan menanggukuhkan perjanjian perlindungan pesawat-pesawat tempur kedua pihak yang beroperasi di Suriah. Perjanjian ini dirancang untuk mencegah tabrakan jet-jet tempur kedua pihak di langit Suriah dengan cara aktif berkomunikasi. Presiden Vladimir Putin juga mengirim kapal perang Rusia bersenjata rudal jelajah Kaliber ke Suriah untuk mendekati kapal-kapal perang AS yang meluncurkan serangan. Menurut laporan *IB Times*, penanggukan perjanjian ini berbahaya dan bisa jadi awal malapetaka menuju Perang Dunia III, terlebih hubungan dua negara kekuatan nuklir terbesar di dunia ini masih retak.

Selain itu, negara-negara di dunia juga mulai bersikap soal dukungan mereka terhadap AS dan Rusia. Uni Eropa, Arab Saudi dan sekutu Teluknya, Turki, Israel hingga Jepang memihak AS dalam serangan terhadap Suriah. Sedangkan, Rusia didukung Iran, Suriah, Irak, dan sejumlah negara Amerika Latin anti-AS. Hal ini

lantas memicu konflik internasional yang dapat mengganggu stabilitas tidak hanya di kawasan timur tengah namun juga secara global.

Trauma Terhadap Intervensi Amerika Serikat di Timur Tengah

Dalam hal ini trauma Iran terhadap intervensi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah merupakan salah satu kondisi atau variabel yang mempengaruhi kebijakan yang diambil menurut variabel derajat pemahaman para pembuat kebijakan terhadap ancaman luar yang berkesinambungan sehubungan dengan nilai dan kepentingan mereka sendiri akan sangat berkaitan dengan orientasi mereka terhadap lingkungan eksternal.

Pada era globalisasi setelah berakhirnya masa perang dingin dengan kemenangan AS, Di Timur Tengah terdapat berbagai kelompok ekstrimis dan fanatik yang telah memicu kekhawatiran dan perasaan anti-Barat yang telah tumpah ke dalam tindakan dan kebencian berbau kekerasan. Hal inilah yang mungkin menjadi pemicu pecahnya peristiwa 9/11 yang membuat AS untuk membentuk kebijakan *war on terrorism* dan menyebarkannya ke seluruh dunia.

Berdalih sebagai kebijakan melawan terrorisme ini, AS lalu melakukan tindakan preventif, dengan melakukan invasi terhadap negara-negara di timur tengah yang diduga merupakan markas teroris yang melakukan serangan dimana Irak, Iran dan afganistan dituduh sebagai negara yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris yang diklaim oleh Amerika Serikat bersalah atas serangan tersebut. Iran disebut-sebut adalah negara sponsor aktifitas kelompok Islam di Lebanon dan Palestina. Irak diduga dekat Al-Qaida dan diperkirakan memiliki senjata pemusah massal/ WMD (*Weapon Of Mass Destruction*) yang dapat jatuh ke tangan para terduga teroris, sedangkan Afganistan di anggap sebagai markas dan basis utama al-Qaida.

Akibatnya pada 7 Oktober 2001 Amerika Serikat melakukan invasi militer ke afganistan dalam upaya untuk menggulingkan Taliban yang diyakini menyembunyikan Osama bin Laden, Dalam paruh pertama tahun ini saja, menurut PBB, 5.100 orang warga sipil menjadi korban dan 1.600 orang di antaranya meninggal dunia. Sepanjang tahun tak kurang dari 11.000 warga sipil tewas atau terluka dalam berbagai serangan, terkena ranjau atau baku tembak yang terjadi di 31 dari 34 provinsi di Afganistan. Saat ini terdapat 1,2 juta warga Afganistan menjadi pengungsi di dalam negeri dan angka ini terus bertambah karena kondisi keamanan yang tak kunjung membaik. Pakistan saat ini menampung 2,4 juta pengungsi Afganistan sedangkan satu juta pengungsi lainnya berada di Iran. Berdasarkan perkiraan Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) dan ditegaskan pemerintah Afganistan, 70 persen warga yang tinggal di kota-kota besar, termasuk Kabul, tinggal di gubuk-gubuk darurat.

Hal ini tentu sangat berdampak negatif terhadap kestabilan ekonomi, politik maupun keamanan yang ada di afgahnistan pada saat itu. Lalu hal yang sama kemudian terjadi pada irak, dimana pada awal Maret 2003, Amerika dan sekutunya mengeluarkan ultimatum kepada Iraq untuk melucuti senjata pemusnah masal yang dituduhkan. Tanpa menunggu hasil keputusan DK PBB, Iraq pun pada akhirnya diserang oleh Amerika yang dibantu oleh Inggris, Australia dan Spanyol. Serangan Amerika Serikat

yang berlangsung selama beberapa hari tersebut telah melumpuhkan Irak secara total baik politik, ekonomi maupun keamanan. Dengan penggulingan pemeritahan yang berkuasa pada saat itu, yaitu Sadam Husein, stabilitas negara tidak dapat terjamin, terlebih dengan beralihnya sistem politik dari otoriter ke demokrasi berujung pada ketidakstabilan politik, ekonomi dan keamanan pada saat itu.

Maka dari itu Iran yang oleh Amerika Serikat diklaim sebagai sponsor aktivitas terorisme di Lebanon dan Palestina, merasa trauma terhadap kebijakan intervensi Amerika Serikat di Timur Tengah. Terlebih lagi setelah perkembangan kerjasama nuklir Iran dan Amerika Serikat yang menjadi konflik pada tahun 2005. Karena Amerika Serikat lebih menilai pengembangan program nuklir Iran sebagai langkah awal untuk mengembangkan senjata nuklir dan keperluan bidang militer, kecurigaan Amerika Serikat ini dilandasi oleh pemikiran bahwa Iran merupakan salah satu negara pendukung gerakan terorisme di dunia, semenjak masa pemerintahan George W. Bush dan Barrack Obama, Amerika Serikat sering memberikan sanksi dan embargo bagi Iran. Berbeda dengan India, Amerika Serikat mendukung program penambahan kapasitas reaktor pembangkit energi tenaga nuklir di India.

Awal mula Iran memiliki energi nuklir dimulai sejak tahun 1950-an pada masa pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlevi dengan bantuan dari Amerika Serikat. Tujuan awal pengembangan program nuklir ini adalah untuk membuka pintu investasi Amerika Serikat di Iran dalam bidang industri nuklir sipil perawatan kesehatan dan obat-obatan. Program pengembangan nuklir ini pada awalnya mendapat dukungan dari Amerika Serikat berupa program atom untuk tujuan damai (*U.S. Atoms for Peace*). Instalasi nuklir pertama Iran ditujukan untuk riset nuklir dengan kekuatan hanya lima megawatt, yang diperoleh dari Amerika Serikat. Kegiatan ini mulai beroperasi pada tahun 1967 ketika didirikannya pusat penelitian tenaga nuklir Tehran *Tehran Nuclear Research Center (TNRC)* dibawah pengawasan organisasi energi atom Iran atau *Atomic Energy Organization of Iran (AEOI)*. Untuk memperoleh kepercayaan dunia akan program nuklir tujuan damainya, pada tahun 1968 Iran menandatangani perjanjian *Non Proliferation Treaty (NPT)*, yang intinya adalah untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata serta mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

Sejarah Kerjasama Bilateral (Pengembangan Nuklir)

Menurut Rossenau perilaku kebijakan luar negeri tidaklah dipengaruhi oleh *single factor*. Dalam kenyataannya, suatu fenomena atau *event* adalah hasil interaksi atau jalinan dari beragam faktor dan dalam jumlah yang besar, yang tidak hanya kepentingan nasional, tapi dipengaruhi oleh ideologi, letak geografis, latar belakang historis, struktur sistem internasional, kondisi politik domestik dan lainnya. Jadi bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh *multiple factor*. Dalam hal ini sejarah kerja sama nuklir Amerika-Iran.

Dari beberapa negara pengembang nuklir di dunia, Iran merupakan salah satu negara yang mengembangkan energi nuklir yang terbilang cukup lama, Dari pertama kali masuknya nuklir tahun 1957 sampai sekarang pengembangan nuklir Iran tetap berjalan, berawal ketika Iran dipimpin oleh Dinasti Shah (1921-1979). Pada pemerintahan shah pahlevi di pertengahan tahun 1960 Iran mulai melibatkan diri

dalam penelitian dan pengembangan nuklir atas dukungan Amerika Serikat dalam kerjasama bilateral antar kedua negara. Amerika dan Iran menandatangani *nuclear cooperation agreement* pada tahun 1957 yang mulai berlaku pada 1959. Kedekatan Iran dan Amerika waktu itu mengasihkan sebuah fasilitas nuklir yang pertama kali dibangun di Tehran *Nuclear Research Center* di tahun 1967 yang bertempat di Tehran University dan dijalankan oleh *atomic organization of Iran* (AEOI) yang memiliki 5 megawatt reaktor nuklir yang disuplai oleh Amerika Serikat tahun 1967. Hingga pada 1 Juli 1968 Iran menandatangani traktat non-proliferasi (NPT) dan berlaku pada 5 Maret 1970 setelah diratifikasi oleh Majelis. Dalam traktat tersebut Iran memiliki hak untuk mengembangkan penelitian, memproduksi, dan menggunakan nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi.

Pada masa rezim Shah Pahlevi Iran lebih cenderung pro Barat ini terbukti dari banyaknya kerjasama dengan negara-negara Barat, tidak hanya Amerika, Iran juga menjalin kerjasama di bidang pengembangan nuklir dengan negara Jerman dan Perancis di tepi Laut Persia, sangat nampak Shah Pahlevi untuk mengembangkan kekuatan militernya termasuk senjata nuklir untuk memperkuat kekuasaannya atas Iran. Era ini pengembangan nuklir Iran sangat melaju pesat.

Pasca revolusi Iran tahun 1979-1989 sebagian besar kerjasama nuklir internasional dengan Iran terputus, hubungan Iran dan Amerika menjadi renggang dan putusnya hubungan diplomatik kedua negara membuat Amerika selalu menentang segala hal mengenai pengembangan nuklir Iran, dan hingga sekarang Iran selalu dibayangi tekanan dari Amerika.

Setelah revolusi Iran, Amerika Serikat memotong pasokan yang sangat diperkaya uranium bahan bakar untuk Pusat Penelitian Nuklir Teheran, yang memaksa reaktor ditutup untuk beberapa tahun. Sampai Komisi Energi Atom Nasional Argentina 1987-1988 menandatangani kesepakatan dengan Iran untuk membantu dalam mengkonversi reaktor dari uranium yang diperkaya bahan bakar untuk 19,75% uranium yang diperkaya rendah ke Iran.

Namun pada April 1984, intelijen Jerman Barat melaporkan bahwa Iran mungkin memiliki bom nuklir dalam waktu dua tahun dengan uranium dari Pakistan. Orang Jerman membocorkan berita ini di publik laporan intelijen Barat yang pertama dari program senjata nuklir pasca-revolusioner di Iran. Ketakutan negara Barat akan nuklir Iran semakin beralasan berdasarkan fakta dan hasil investigasi sehingga Amerika mulai mengancam bahwa Iran adalah ancaman bagi perdamaian dunia karena kepemilikan senjata nuklirnya dan salah satu caranya adalah serangan militer ke fasilitas nuklir Iran.

Pada tahun 1992, menyusul tuduhan media tentang kegiatan nuklir rahasia di Iran, Iran mengundang inspektur *International Atomic Energy Agency* (IAEA) ke negara itu dan mengizinkan seorang inspektur untuk mengunjungi semua situs dan fasilitas yang mereka minta untuk melihat. Direktur Jenderal Blix melaporkan bahwa semua kegiatan yang diamati sesuai dengan penggunaan damai energi atom. Amerika tidak berhenti begitu saja dalam menekan Iran, Menurut sebuah laporan Amerika menekan

argentina untuk mengakhiri kerjasama nuklir yang di sepakati dengan Iran agar Iran dapat menghentikan program pengembangan nuklir nya.

Masa rezim Ali Khomaeni (1981-1989) masa republik islam Iran, penyebaran tentang kaidah islam sangat kuat di Iran, pada masa ini pengembangan nuklir Iran tidak melaju pesat karna khomaeni lebih berfokus menciptakan Iran sebagai negara yang maju, islami, dan modern. Namun hubungan Iran dan Amerika serikat begitu renggang dan putusnya hubungan diplomatik kedua negara, Iran menganggap Amerika sebagai negara yang mempengaruhi Iran untuk menjauh dari akidah dan syariat islam, terlebih Amerika selalu menentang Iran dalam pengembangan nuklir pada masa ini, sehingga Iran selalu mendapat tekanan dari Amerika yang membuat stagnan program proliferasi nuklir Iran.

Berbeda dengan kepemimpinan masa sebelumnya, di masa kepemimpinan Mahmoud Ahmaddinejad yang terpilih menjadi presiden sejak tahun 2005, Iran menjadi perhatian utama dunia barat terutama Amerika dan sekutunya Israel. Sebagai seorang konservatif garis keras yang berpegang teguh pada nilai-nilai dan semangat revolusi, Ahmaddinejad yang vokal menyuarakan sikap anti-barat dan Israel sering membuat peperangan hampir terjadi antara Israel dan Iran . Sikap keras Ahmaddinejad yang keras tentang permasalahan hak Iran untuk mengembangkan nuklir damai membuat kondisi internal Iran tersebut terisolasi. Namun di bawah kepemimpinan selama dua priode (2005-2009),(2009-2013), Iran mampu bertahan di tengah tekanan dan isolasi politik maupun ekonomi yang di lakukan oleh negara-negara barat .

Kesimpulan

Kemunculan pergerakan ISIS di Timur Tengah menimbulkan adanya indikasi pergerakan terorisme dan *radical movement* di Irak dan Suriah pada khususnya. Hal ini yang menyebabkan reaksi keras dan tanggapan dunia internasional terkait pergerakan terorisme. Amerika Serikat yang memiliki fokus dalam memberantas atau melawan pergerakan terorisme di dunia merespon tindakan ISIS tersebut dengan menghimbau negara-negara yang memiliki fokus yang sama terhadap pemberantasan terorisme untuk mendukung penawaran pembentukan koalisi yang dibentuk Amerika Serikat untuk memerangi pergerakan ISIS. Tujuan utama koalisi tersebut adalah untuk mengkoordinasikan penanggulangan ancaman yang ditunjukkan ISIS. Dengan semakin banyaknya Negara yang bergabung, maka semakin banyak sumberdaya, baik manusia ataupun teknologi untuk melawan ISIS.

Koalisi Internasional yang dibangun oleh Amerika Serikat mendapat tanggapan positif dari dunia internasional. Dengan bergabungnya beberapa Negara dalam koalisi Amerika mengklaim telah membangun koalisi yang terdiri dari 10 negara inti dan 30 negara yang mendukung dalam aspek militer untuk memerangi kelompok ISIS sedangkan negara lainnya akan membantu di bidang lain seperti bantuan kemanusiaan. Salah satu dari tawaran koalisi tersebut adalah Amerika Serikat menawarkan ajakan untuk bergabung dengan koalisi kepada Iran. Dalam tawaran tersebut Iran cenderung menolak karena Iran berpendapat bahwa tidak efektif jika dilakukan intervensi militer terhadap ISIS. Namun demikian, Iran akan ikut serta dalam diskusi memerangi kelompok militan ISIS.

Daftar Pustaka

Buku

Halim, Abdul. *Ambisi Global Amerika Serikat dalam Mahally : Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat*. 2003. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Haidar Assad, Muhammad. *ISIS Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*. 2014 Jakarta: Zahira

Holsti, K.J, "Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis Jilid I", Jakarta : Eirlangga, 1998.

Setiawati, Siti Muti'ah, dkk. *Irak Dibawah Kekuasaan Amerika, Dampaknya Bagi Stabilitas Politik Timur Tengah Dan Reaksi (Masyarakat) Indonesia*. 2004. Yogyakarta : PPMTT, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. UGM.

Media Internet

A History of Iran's Nuclear Program" yang terdapat dalam <http://www.iranwatch.org/our-publications/weapon-program-backgroundreport/history-irans-nuclear-program>

BBC Indonesia. Profile ISIS. Diakses melalui http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/07/140725_profil_isis

France24, "UN calls for international action after attacks on Iraqi minorities", France24, <<http://www.france24.com/en/20140808-un-security-council-calls-action-Iraq-Isis-attacks/>>

Singgih Soares, "BNPT Declares ISIS a Terrorist Organization", Tempo, <<http://en.tempo.co/read/news/2014/08/02/055596766/BNPT-Declares-ISIS-a-Terrorist-Organization>>

U.S., *Coalition Forces To Boost Efforts Against ISIS Propaganda*, diakses dari www.pbsnewshour.com